

PERAN PARTAI NASDEM DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK

Maulana Azri Ba'dawi¹, M. Ahdavi², Muhammad Ikmal Drajat³, Adinda Tasya Azzahra Hasibuan⁴, Karmila Damanik⁵, Dini Arti Lubis⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Pemikiran Politik Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

azribadawi@gmail.com , davirevanza91@gmail.com , Darajatikmal@gmail.com ,
adindatasyaa8@gmail.com , damanikkarmila8@gmail.com ,
diniartilubis02@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia, as the third largest democracy in the world, underlines the active participation of its citizens in elections as the key to the success of democracy. This research uses a qualitative approach to understand the role of the NasDem Party in shaping political ethics. Data were obtained through case studies, analysis of official documents, and monitoring of party activities. The NasDem Party, with a focus on transparency, accountability, integrity, and social justice, is actively involved in shaping a political environment of integrity. As an agent of change, the party not only talks about political ethics, but also acts as a pioneer in applying moral and ethical values in policy. This research contributes to a deeper understanding of the political dynamics and values promoted by political parties, as well as inspiration for other parties in shaping positive and sustainable political ethics to strengthen the foundation of Indonesian democracy.

Keywords: Democracy, Ethics, Political Ethics, Political Party, NasDem Party.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, menggarisbawahi partisipasi aktif warganya dalam pemilihan umum sebagai kunci keberhasilan demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami peran Partai NasDem dalam membentuk etika politik. Data diperoleh melalui studi kasus, analisis dokumen resmi, dan pemantauan kegiatan partai. Partai NasDem, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan sosial, terlibat aktif dalam membentuk lingkungan politik yang berintegritas. Sebagai agen perubahan, partai ini bukan hanya berbicara tentang etika politik, tetapi juga bertindak sebagai pionir dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang dinamika politik dan nilai-nilai yang dikedepankan oleh partai politik, serta inspirasi bagi partai lain dalam membentuk etika politik yang positif dan berkelanjutan untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.

Kata Kunci : Demokrasi, Etika, Etika Politik, Partai Politik, Partai NasDem.

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara
berdasarkan sistem demokrasi,

menitikberatkan pada partisipasi aktif
warganya dalam proses demokrasi.
Implementasi demokrasi ini tercermin

melalui pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) secara berkala, yang menjadi titik kunci partisipasi warga. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia telah berhasil membentuk lanskap demokrasi yang matang, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu adalah indikator keberhasilan demokrasi.

Keberhasilan pemilu di Indonesia sangat terkait dengan peran penting masyarakat dalam memberikan suara dan mengawasi proses pemilu di tingkat lokal dan nasional. Keterlibatan warga menjadi dasar bagi kemajuan demokrasi yang berkelanjutan. Undang-Undang Pemilihan Umum 2017 (UU Nomor 7 Tahun 2017) menjelaskan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Besarnya partisipasi masyarakat menjadi penentu utama kesuksesan pemilu, dengan berbagai bentuk keterlibatan seperti memberikan suara, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses pemilu. Ragam

tindakan partisipatif mencerminkan peran vitalnya dalam membentuk kualitas pemilu. Secara esensial, partisipasi masyarakat menjadi indikator penting kualitas demokrasi, sejalan dengan slogan yang terkenal dari Lincoln, "pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat" (Hafidz, 2019).

Dalam konteks konsep manusia sebagai makhluk politik, ini menunjukkan bahwa pemikiran politik terkait dengan proses dan hasil kegiatan politik dalam suatu sistem pemerintahan didasarkan pada esensi manusia. Manusia menjadi kriteria dan tujuan utama. Meskipun manusia pada dasarnya ambivalen dalam politik, kekuasaan selalu memiliki potensi disalahgunakan. Sejak zaman dahulu, upaya dilakukan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan, terutama oleh pemegang kekuasaan politik.

Konsep etika atau filsafat moral dapat diterapkan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi dasar bagi individu atau kelompok dalam mengatur perilaku mereka. Etika memberikan landasan moral bagi politik. Mengabaikan etika dalam kehidupan politik dapat mengarah pada praktik politik yang Machiavellian, di mana politik dianggap sebagai alat untuk

mencapai segala hal, baik atau buruk, tanpa memperhatikan nilai-nilai moral atau norma yang berlaku.

Kebebasan manusia dapat diterima selama individu mampu mengembangkan pikiran tentang tujuan dan cara kehidupan mereka. Dalam konteks kehidupan politik, mengatur kehidupan politik dengan menjadikan etika sebagai dasar dapat menghasilkan politik yang memperhatikan aturan permainan dan memahami apa yang harus dilakukan serta apa yang harus dihindari.

Berdasarkan hal tersebut, dalam membangun etika politik partai Nasdem sebagai partai politik memiliki tanggung jawab dalam membentuk pandangan etis dan moral dalam kehidupan politik. Dengan mendasarkan diri pada etika, partai Nasdem dapat menjadi pionir dalam mempromosikan politik yang bermoral dan berprinsip, memberikan kontribusi positif untuk kemajuan demokrasi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis peran Partai NasDem dalam membentuk etika politik di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena

dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sikap, nilai, dan tindakan Partai NasDem dalam membentuk etika politik, serta dampaknya terhadap dinamika politik dan masyarakat. Data akan diperoleh melalui studi kasus, analisis dokumen resmi partai, dan pemantauan terhadap kegiatan dan inisiatif yang diambil oleh partai tersebut melalui website resmi partai tersebut, pada tahap ini peneliti melakukan penelitian di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara tepatnya di fraksi NasDem.

Metode ini akan memberikan kesempatan untuk menggali pandangan dan pemahaman langsung dari para pemangku kepentingan di Partai NasDem terkait dengan upaya mereka dalam membentuk etika politik. Selain itu, analisis dokumen resmi partai akan memberikan konteks historis dan kerangka kerja formal yang membimbing langkah-langkah partai dalam mengembangkan prinsip-prinsip etika politik. Pemantauan kegiatan partai akan memberikan gambaran praktis tentang implementasi dan kontribusi nyata Partai NasDem dalam membentuk etika politik di tingkat praktis.

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penelitian ini bertujuan

untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap peran Partai NasDem dalam membentuk etika politik di Indonesia, dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh partai politik dalam konteks demokrasi Indonesia.

Pembahasan

Secara sederhana, etika muncul sebagai teori yang timbul dari kesadaran akan tragedi seperti kekacauan (anarki) yang terjadi di berbagai tingkatan, baik pada tingkat individu, kelompok, dunia, maupun alam semesta. Etika membedakan dirinya dari filsafat ilmu pengetahuan yang mengeksplorasi masalah-masalah berdasarkan prinsip benar-salah. Dalam perbandingan dengan estetika yang menyoroti keindahan dan ketidaksempurnaan, etika memfokuskan pembahasannya pada yang baik dan yang buruk, menjadikannya sebagai isu kebijakan. Etika diangkat ke permukaan untuk menyeimbangkan kepentingan yang beragam dan mungkin saling bertentangan, serta memastikan bahwa proses perdamaian dapat memenuhi standar norma keadilan dan kemanusiaan.

Etika, baik di tingkat makro maupun mikro, bertujuan untuk membimbing manusia bersama ilmu pengetahuan (sains) dan seni (estetika), agar mencapai tujuan yang Aristoteles sebut sebagai Eudemoni atau kebahagiaan. Sebagaimana disampaikan oleh Karl Barth (dalam Nurcholis Madjid, 1992: 467), etika (dari *ethos*) setara dengan moral (dari *mos*), keduanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Kata Jerman "*Sitte*" (dari bahasa Jerman kuno, "*situ*") merujuk pada arti mode (mode tingkah laku manusia), suatu konstansi (*constancy*, ketentuan) dalam tindakan manusia. Oleh karena itu, secara umum, etika atau moral merupakan filsafat, ilmu, atau disiplin tentang mode-mode tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.

Etika tetap relevan dan akan terus relevan karena kehidupan manusia senantiasa ditandai oleh pertarungan (konflik) antara kekuatan baik dan kekuatan jahat yang tak pernah berhenti. Etika menggunakan rasio untuk menilai kualitas moral dan kebajikan, sehingga disebut juga sebagai sistem filsafat yang mempertanyakan praksis manusia terkait tanggung jawab dan kewajibannya (Soeseno, 1988:13).

Atau dengan retorika posmodernisme yang lebih fungsional, etika menjadi penting karena persaingan dalam permainan kekuasaan atau dominasi dalam kelompok ekonomi atau budaya tertentu selalu berusaha merebut supremasi.

Etika Politik

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yang membahas norma-norma moral yang seharusnya membentuk sikap dan tindakan antar manusia. Ini karena hampir semua kewajiban manusia terkait dengan kenyataan bahwa mereka adalah makhluk sosial. Etika politik tidak bertujuan menyusun sistem normatif sebagai dasar negara. Sifatnya yang reflektif memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana menghadapi masalah kehidupan, tetapi tidak memberikan solusi konkret untuk memecahkannya.

Dengan demikian, etika politik mengajukan pertanyaan tentang tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai individu, bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum, dan hal lainnya. Karena kebaikan manusia sebagai individu dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak selalu identik. Fungsi etika politik

terbatas pada penyediaan pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik dengan cara yang bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif.

Oleh karena itu, peran etika politik lebih pada memberikan sumbangan pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif. Tugas utamanya adalah membantu agar pembahasan masalah ideologi dapat dilakukan secara objektif, yaitu berdasarkan argumen-argumen yang dapat dimengerti dan ditanggapi oleh semua pihak yang memahami permasalahan.

Etika politik juga dapat berfungsi sebagai sarana kritik terhadap ideologi (bukan negara dan hukum), melibatkan pemahaman terhadap pandangan dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Dengan demikian, etika politik dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan ideologi negara yang mulia ke dalam realitas politik yang nyata. Sebagai contoh, melalui refleksi terhadap inti atau hakikat keadilan sosial, etika politik dapat membahas bagaimana kekuasaan harus diatur agar sesuai dengan martabat manusia (Soeseno, 1988:2).

Sejarah Partai Politik

Partai politik pertama kali muncul di negara-negara Eropa Barat, di mana gagasan bahwa peran rakyat perlu diakui dan diikutsertakan dalam politik menjadi kunci. Partai-partai ini berkembang sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah. Ada tiga teori yang menjelaskan asal-usul partai politik: pertama, teori kelembagaan yang mengaitkan terbentuknya partai politik dengan hubungan awal antara parlemen dan perkembangan partai politik. Kedua, teori situasi historis melihat munculnya partai politik sebagai respons terhadap krisis yang timbul akibat perubahan masyarakat yang signifikan. Ketiga, teori pembangunan memandang partai politik sebagai hasil dari modernisasi sosial ekonomi.

Teori pertama menjelaskan bahwa partai politik muncul dari kalangan legislatif dan eksekutif yang menyadari pentingnya menjalin hubungan positif dengan masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Partai politik terbentuk sebagai upaya mengakomodasi beragam kepentingan daerah. Sebagai contoh, di Versailles, perwakilan provinsi dalam General State berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan daerah masing-masing. Di samping itu, ada

pula partai politik yang muncul dari pemimpin masyarakat yang sadar politik dan merasa bahwa partai pemerintah tidak mencakup dan memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini tidak hanya terjadi di negara yang terjajah, tetapi juga di negara maju seperti terbentuknya Partai Buruh di Inggris dan Australia, serta Partai Hijau di Jerman.

Teori kedua menyatakan bahwa situasi historis krisis terjadi ketika sistem politik mengalami transisi akibat perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Perubahan tersebut melibatkan pertumbuhan penduduk, peningkatan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas pekerjaan, perubahan dalam pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, orientasi ekonomi pasar, aspirasi yang meningkat, dan munculnya gerakan populis. Partai politik muncul sebagai respons terhadap tiga tantangan yang diakibatkan oleh perubahan tersebut, yaitu legitimasi, integrasi, dan partisipasi.

Dalam hal ini, perubahan-perubahan mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan yang memerintah, menimbulkan masalah dalam identitas

yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa, dan mengakibatkan timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam urusan politik. Diharapkan bahwa partai politik yang terbuka bagi setiap anggota masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi dapat berperan sebagai pengintegrasikan umum yang berfungsi sebagai sarana konstitusional untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, partai politik juga diharapkan dapat berperan sebagai saluran partisipasi politik masyarakat.

Ketiga, teori ini melihat bahwa modernisasi sosial ekonomi memaksa lahirnya suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi. Aspirasi ini berkaitan dengan pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan.

Peran Partai Nasdem Dalam Membangun Etika Politik

Partai NasDem, sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia, memiliki peran penting dalam membentuk dan membangun etika politik di tengah masyarakat. Dengan visi dan misinya yang terfokus pada kepentingan rakyat dan demokrasi, Partai NasDem telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip etika politik yang mendasar. Salah satu pilar utama dalam kontribusinya adalah penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah dan keputusan politik yang diambil.

Partai NasDem secara konsisten menegaskan pentingnya integritas dan kejujuran dalam semua lapisan partainya. Dengan mengambil sikap yang tegas terhadap praktik-praktik politik yang merugikan kepentingan publik, partai ini berusaha membangun citra politik yang bersih dan bertanggung jawab. Langkah-langkah nyata, seperti pemberlakuan kode etik internal dan sanksi terhadap anggota yang terlibat dalam perilaku yang tidak etis, menjadi bukti dari upaya Partai NasDem untuk menciptakan lingkungan politik yang berintegritas.

Selain itu, Partai NasDem juga aktif terlibat dalam mendukung reformasi politik di Indonesia.

Dukungan ini tercermin dalam partisipasinya dalam proses legislasi dan advokasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Partai ini tidak hanya berbicara tentang etika politik, tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika.

Partai NasDem juga mengusung nilai-nilai etika politik yang bersifat inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks ini, partai ini secara aktif mendukung hak-hak minoritas dan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan demikian, peran Partai NasDem tidak hanya terbatas pada aspek formal politik, tetapi juga melibatkan dimensi sosial yang mencerminkan kesadaran akan kebutuhan etika politik yang lebih holistik.

Dalam keseluruhan, Partai NasDem mewakili sebuah kekuatan politik yang berkomitmen pada pembangunan etika politik yang kuat dan positif. Melalui langkah-langkah konkret dan partisipasinya dalam berbagai aspek kehidupan politik, Partai NasDem membuktikan bahwa etika politik bukan hanya retorika kosong, melainkan pondasi yang

mendasari setiap tindakan dan keputusan politiknya untuk mencapai tatanan politik yang lebih baik.

D. Kesimpulan

Partai NasDem, sebagai pemain utama dalam panggung politik Indonesia, telah menunjukkan dedikasinya dalam membangun etika politik yang kuat dan positif. Dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kejujuran, partai ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pembentukan lingkungan politik yang berintegritas di Indonesia.

Langkah-langkah nyata yang diambil oleh Partai NasDem, seperti penerapan kode etik internal dan sanksi terhadap anggota yang terlibat dalam perilaku yang tidak etis, menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip moral dalam berpolitik. Partai NasDem juga tidak hanya terfokus pada aspek formal politik, tetapi juga aktif terlibat dalam mendukung hak-hak minoritas dan memperjuangkan keadilan sosial, mencerminkan kesadaran akan dimensi sosial yang esensial dalam etika politik.

Dalam menghadapi dinamika politik dan tuntutan masyarakat, Partai NasDem berperan sebagai agen

perubahan yang konstruktif, terlibat dalam proses legislasi dan advokasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Partai ini bukan hanya berbicara tentang etika politik, tetapi juga bertindak sebagai pionir dalam membentuk kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika.

Dengan demikian, Partai NasDem memberikan inspirasi bagi partai politik lainnya untuk mengikuti jejaknya dalam membentuk etika politik yang positif dan berkelanjutan. Dengan fokus pada kepentingan rakyat dan demokrasi, Partai NasDem menjadi pemimpin yang memahami bahwa etika politik bukan hanya menjadi fondasi retorika, melainkan suatu landasan utama yang membimbing setiap langkah dan keputusan politiknya.

Sebagai penutup, peran Partai NasDem dalam membentuk etika politik menjadi bagian integral dalam memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Dengan harapan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika yang diusungnya akan terus menjadi pilar utama dalam perjalanan politik negara ini menuju masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, & A.C. van Deerlenden. 1986. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Iswara, F. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bina Cipta. Bandung.
- Kung, Hans. 2002. *Etika Global*. Qalam. Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam, & Ilham, Teguh. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nor, Deliar. 1997. *Etika Politik dan Negara Demokrasi*. Unisia No. 35. Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suseno, Frans Magnis. 2016. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Urofsky, M.J. 2001. *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*. Jurnal Demokrasi, USA: Office of International Information Programs.